



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 230/11122008
HARI : KAMIS
TANGGAL : 11 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	Asia Kini Lebih Tahan Krisis	3
	SBY touts Asia as new power, dismisses radicalism threat	3
	1 Miliar Orang Kelaparan di Dunia	4
	Bank Dunia Tawarkan Bantuan Cepat US\$2,9 Miliar	5
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Martti Ahtisaari Berjasa bagi Perdamaian Indonesia-GAM	5
	Presiden Yudhoyono Akan Pimpin Pemakaman Ali Alatas	6
	B. EKONOMI	
	Diversifikasi Pasar Ekspor, Mau Dibawa ke Mana?	7
	Foreign investment up, Jakarta takes most	8
	'Produk RI hanya butuh sentuhan brand awareness'	9
	Tahun 2009 Beban Cukai Naik 7 Persen	9
	C. SOSBUD	
	Menkes Minta WHO Ubah Aturan Pembagian Virus AI	10
	D. HANKAM	

		Indonesia-Malaysia Sepakat Mantapkan Kerjasama Perbatasan	11
	E.	HUKUM	
		Pemerintah Gagal Jamin Hak Konstitusi Warga Negara	11
	F.	OLAHRAGA	--
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
		Indonesia Negara II Miliki Keanekaragaman Hayati	12
	III.	ARTIKEL	
		Krisis tak pengaruhi WNI ke Singapura (oleh : Zufrizal)	13
		The Bali Democracy Forum and our own problems (by Aleksius Jemadu)	14
	IV.	LAIN-LAIN	--
	V.	EDITORIAL	
		60 Tahun Deklarasi HAM	15
		Humans for sale	16

Jakarta, 11 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Asia Kini Lebih Tahan Krisis

Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2009 diperkirakan masih melambat akibat krisis finansial. Namun, Asia kini dinilai lebih tahan menghadapi krisis. Dalam laporan terbarunya yang dirilis Selasa (9/12), Bank Dunia mengingatkan bahwa krisis perekonomian yang kini melanda dunia bisa menjadi lebih parah dibandingkan Depresi Hebat (Great Depression) di tahun 1930-an. Perlambatan ekonomi dunia itu dilihat dari jatuhnya ekspor dan lambatnya investasi bisnis di sejumlah negara di Asia Timur.

Kendati demikian, Bank Dunia memberikan apresiasi kepada para pembuat kebijakan di sejumlah negara yang bergerak cepat dalam merespons krisis. Aksi tersebut dinilai mampu membantu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Asia. "Sistem perbankan di kawasan Asia Timur sejauh ini bisa diandalkan.

Paket stimulusnya juga sudah tepat. Terima kasih karena telah melakukan aksi cepat ini," kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kawasan Asia Pasifik Jim Adam dalam pernyataannya kemarin. Dia menambahkan, kebijakan moneter yang dikeluarkan negara-negara di Asia Timur diharapkan bisa melanjutkan peran dalam proses stabilisasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi global.

Bank Dunia menilai krisis keuangan di Asia pada pertengahan 1997–1998 telah membuat kawasan ini menjadi lebih kuat dalam satu dekade terakhir. Lembaga tersebut juga menilai sejumlah elemen keuangan seperti pengawasan yang ketat dari bank sentral, keseimbangan neraca perusahaan, dan kebijakan makroekonomi menjadikan sistem manajemen risikodi Asia Timur cukup baik.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Kawasan Asia Pasifik Vikram Nehru mengatakan, negara-negara Asia harus bekerja sama dalam menjaga stabilitas makroekonomi, ekspor antarkawasan, dan memperkuat pasar domestik. Dalam laporan tahunannya, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi dunia hanya tumbuh 2,5% sepanjang tahun ini dan 0,9% pada 2009.

Sementara negara-negara berkembang diperkirakan tumbuh 4,5%, turun dibandingkan 2007 yang rata-rata mencapai 7,9%. Untuk Indonesia, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini 6,0%, turun 0,3% dibandingkan pertumbuhan tahun lalu.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia William E Wallace mengatakan, kendati terjadi penurunan pada kuartal terakhir akibat dampak perlambatan ekonomi global, pertumbuhan yang cukup positif selama tiga kuartal sebelumnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa bertahan di level 6,0%.

Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diperkirakan turun signifikan menjadi 4,4%. Penurunan disebabkan oleh dampak perlambatan ekonomi dunia yang terus berlanjut sepanjang 2009. "Sejak era 1970-an hingga sekarang, ini merupakan resesi terburuk sebagai gabungan krisis ekonomi negaranegara mitra dagang Indonesia," kata Bank Dunia dalam laporan bertajuk Indonesia Quarterly Economic Update: Battering Down The Hatches.

Menurut lembaga donor itu, penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dipengaruhi pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama yang pada kuartal III berada di bawah ekspektasi. Kondisi ini berdampak pada prospek penanaman modal langsung (foreign direct investment/ FDI) dan permintaan produk domestik pada tahun depan.

Bank Dunia memperkirakan FDI dalam negeri pada 2009 hanya tumbuh 0%, sedangkan volume ekspor hanya 1–2%. Kendati begitu, Bank Dunia melihat adanya efek positif dari krisis

keuangan dan ekonomi dunia saat ini, yaitu perlambatan dalam laju inflasi Indonesia tahun depan sehingga dapat menyokong pendapatan riil rumah tangga. Rata-rata laju inflasi tahun depan diproyeksikan 7%, selanjutnya turun menjadi 6% pada 2010. (Koran Sindo)

2. SBY touts Asia as new power, dismisses radicalism threat

President Susilo Bambang Yudhoyono believes Asia is replacing the West as the world's center of power and that Indonesia is well geared to address a growing tendency toward fundamentalism.

"There has been a kind of changing global landscape, a shifting of the central power from the United States and Europe to Asia over the last 15 years," Yudhoyono told a joint press conference on the sidelines of the inaugural session of the Bali Democracy Forum on Wednesday.

The inaugural session, entitled "Building and Consolidating Democracy: A Strategic Agenda for Asia", was attended by foreign ministers and delegates from at least 32 countries and three heads of state — Sultan Hassanal Bolkiah of Brunei Darussalam, Prime Minister Kevin Rudd of Australia and Prime Minister Xanana Gusmao of Timor Leste.

Yudhoyono said that the forum, which is open to all Asian countries and will regularly gather country representatives at the ministerial level, constituted Indonesia's contribution to Asia's transition into a new era.

The President also launched the Institute for Peace and Democracy on the campus of state-run Udayana University in Jimbaran, Bali.

"This (Asian) region will be very dynamic in the future, especially in terms of politics, culture and economy and technology," he said, describing the region as a melting pot for various civilizations.

"Indonesia itself is in the process of a transformation to build a better democracy and create harmony among its plural society," he said.

Indonesia, he continued, had strategic policies in place to maintain pluralism and avoid a tendency toward fundamentalism.

"Indonesia is a unique blend of Islamic, oriental and western civilizations with Hindu and Buddhist influences coming to our people in the third century. Islam arrived in the 13th century, and Western civilization came in the 17th century, first in the form of colonialism but later in the form of modern nationalism," he said.

Over the centuries, the Indonesian archipelago absorbed influences from those civilizations, Yudhoyono said, adding that there was always the possibility that such influences could collide but that Indonesian democracy was providing a home for those cultures and religions to blend harmoniously.

"Our present democracy is now 10 years old, born in the aftermath of a financial crisis that gave birth to the reform movement.

He said Indonesia had progressed in leaps and bounds in its democratic transition, but that there was still much more to be done.

"The Bali Democracy Forum comes forth because we realize the need for an organized learning process and comprehensive dialogue on democracy. A high level dialogue which is wider, more inclusive and more focused than any that has been attempted before," Yudhoyono said. (The Jakarta Post)

3. 1 Miliar Orang Kelaparan di Dunia

Jumlah orang kelaparan di dunia hampir 1 miliar atau tepatnya 936 juta warga pada 2008. Tahun ini jumlah orang kelaparan di dunia bertambah sebanyak 40 orang karena kenaikan harga produk makanan.

"Realitas itu seharusnya tidak bisa diterima pada abad ke-21 ini. Belum cukup tindakan yang kita lakukan untuk mengurangi jumlah kelaparan, belum cukup langkah untuk mencegah kelaparan karena ini terus bertambah," ujar Direktur FAO, badan PBB untuk urusan pangan, Jacques Diouf.

Diouf memperingatkan seluruh negara di dunia bahwa tidak ada kemajuan sama sekali dalam penanganan kelaparan. "Pada 2006, saya telah memperingatkan pada konferensi Millennium Development Goal's/MDG's (Sasaran Pembangunan Milenium) bahwa tidak mungkin target kita dapat tercapai pada 2015, tapi 2150," katanya.

Sebanyak 907 juta orang kelaparan pada 2008 berada di negara-negara berkembang. Sebanyak 65% orang yang kelaparan di dunia ini terjadi di tujuh negara, yakni Indonesia, China, India, Kongo, Bangladesh, Pakistan, dan Ethiopia. Diouf mengaku pesimistis pencapaian pemberantasan kelaparan bisa tercapai pada 2015.

Menurut dia, krisis ekonomi global telah menjadi negara-negara berkembang akan "melempar handuk" sebagai tanda menyerah. "Jelas, hal itu tidak bisa diterima," katanya. Diouf meminta Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Barack Obama untuk memimpin perang melawan kelaparan pada Konferensi MDG's tahun depan.

"Obama telah memulai kampanye dengan kata sederhana, 'Ya Kita Bisa'. Saya berharap itu akan membantu kita," katanya. Sementara menurut Gafez Ghanem, Asisten Direktur Jenderal FAO, jutaan orang di negara berkembang bertahan hidup dari makanan seadanya. "Kesehatan yang layak pun menjadi mimpi," ujarnya.

Berdasarkan data itu, hampir dua pertiga kelaparan terjadi di Asia, sisanya di negaranegara Afrika. Umumnya, negara-negara yang banyak mengalami kelaparan disebabkan meningkatnya harga makanan sehingga sebagian besar penduduk harus menahan lapar dan mengonsumsi makanan sekadarnya. Yang lebih parah, FAO mencatat sebagian warga yang kelaparan tidak memiliki tanah untuk ditanami tanaman pangan. (Koran Sindo)

4. Bank Dunia Tawarkan Bantuan Cepat US\$2,9 Miliar

Bank Dunia pada Rabu (10/12) mengumumkan, membentuk program pinjaman jalur cepat sebesar 2,9 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara miskin yang terkena dampak krisis finansial global.

Dewan eksekutif bank pada Selasa, menyetujui pembentukan fasilitas pinjaman tersebut yang akan diberikan dengan cepat dan berjangka panjang, bebas suku bunga pinjaman kepada negara-negara miskin yang menghadapi kesulitan, kata bank dunia dalam sebuah pernyataannya.

Program baru, International Development Association (IDA) Financial Crisis Response Fast-Track Facility ini, memungkinkan Bank Dunia menyediakan pendanaan cepat untuk jaring pengaman sosial, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

"Orang miskin akan terpukul keras oleh krisis yang kemungkinan akan kian memburuk pada tahun depan," kata Presiden Bank Dunia Robert Zoellick dalam sebuah pernyataannya.

"Kami ingin membantu negara-negara mengelola penurunan ini dengan pembiayaan cepat untuk membantu meminimalisir dampak krisis dan membantu mereka dalam merancang kebijakan yang mendukung."

Zoellick mencatat bahwa pertumbuhan proyek-proyek ekonomi Bank Dunia di negara-negara berkembang hanya mencapai 4,5 persen pada 2009, turun dari 7,9 persen pada 2007, karena krisis finansial global memotong produksi. (Media Indonesia)

I .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Martti Ahtisaari Berjasa bagi Perdamaian Indonesia-GAM

Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia bersama dengan Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta Rabu malam menyelenggarakan resepsi untuk menghormati penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian 2008 bagi Martti Ahtisaari, yang berjasa besar antara lain dalam proses perdamaian RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Resepsi yang berlangsung di kediaman Dubes Kerajaan Norwegia untuk Indonesia Eivind S Homme dihadiri antara lain oleh Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Muhamamd Nazar, Kuasa Usaha Kedubes Finlandia untuk Indonesia Steffan Lindstrom, sejumlah diplomat senior dari Eropa dan tokoh Indonesia.

"Martti Ahtisaari layak meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2008 karena prestasinya membantu menyelesaikan konflik di Aceh (Indonesia), Namibia, Balkan dan beberapa kawasan lainnya," kata Dubes Homme dalam sambutannya.

Upacara penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian 2008 akan dilangsungkan di Oslo, Norwegia, Rabu waktu setempat, sementara itu Kedubes Norwegia menayangkan video Ahtisaari yang menyampaikan sambutannya berisi antara lain pengakuannya sebagai juru runding pertemuan yang melibatkan RI dan GAM sehingga kedua pihak mencapai perdamaian sebagai suatu yang berkesan mendalam.

Dengan kemampuannya sebagai penengah, tambah Dubes Homme, Ahtisaari memberikan sumbangan besar bagi pencapaian perdamaian seperti di Aceh.

Ahtisaari pernah menjadi presiden Finlandia pada tahun 1994 hingga 2000 dan setelah tak lagi menjabat presiden, ia memimpin the Crisis Management Initiative (CMI) yang memainkan peran sentral bagi penyelesaian konflik di Aceh tempat GAM menuntut kemerdekaan.

CMI diminta untuk memfasilitasi pembicaraan antara wakil pemerintah RI dan GAM sejak tahun 2003 hingga sebuah perjanjian damai ditandatangani kedua pihak pada 15 Agustus 2005 di Helsinki.

Kuasa Usaha Kedubes Finlandia, Steffan Lindstrom menyampaikan sekelumit sosok Ahtisaari yang dilahirkan pada 1937 di Vyborg, Finlandia.

Ahtisaari yang pernah menjadi guru sebelum menjadi diplomat dikenal antara lain sebagai juru runding yang jujur, suka humor dan berbicara langsung pada inti masalah, kata Lindstrom.

"Sebagai juru runding yang baik, ia menggunakan kosa kata yang jelas. Ia juga dapat tegas dan berbicara kebenaran secara terbuka," tambahnya.

Dalam acara itu Wagub NAD Muhammad Nazar juga menyampaikan perkembangan terakhir di provinsi itu, termasuk integrasi mantan anggota GAM ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, katanya, sejumlah partai lokal telah berdiri sesuai dengan kesepakatan Helsinki.

"Tahun 2009, partai-partai lokal beserta partai nasional akan ikut dalam pemilihan legislatif," ujarnya.

Ketika ditanya hubungan bilateral RI-Norwegia, Dubes Homme mengatakan hubungan keduanya baik dan kerjasamanya erat.

"Kedua negara juga terlibat aktif dalam berbagai forum multilateral," tambahnya.

Ia mengatakan dirinya baru kembali untuk menghadiri Bali Democratic Forum yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penegamat.(ANTARA)

2. Presiden Yudhoyono Akan Pimpin Pemakaman Ali Alatas

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan akan memimpin langsung upacara pemakaman jenazah Ali Alatas pada Jumat (12/12) di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Seperti yang diungkapkan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia Teguh Wardoyo di Jakarta, Kamis (11/12), upacara pemakaman diplomat ulung Indonesia itu akan dilakukan pada Jumat pukul 09.00 WIB.

Teguh mengatakan, jenazah Alatas pada Kamis sore diterbangkan dari Singapura dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 869, yang dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 18.30 WIB.

Peti jenazah akan diterima oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda di Ruang VIP Soekarno-Hatta dan selanjutnya langsung dibawa ke rumah duka di Jl. Benda Raya No. 19, Kemang Selatan, Jakarta Selatan.

Di rumah duka, jenazah akan diterima oleh Wakil Menlu Triyono Wibowo.

Adapun dalam penerbangan dari Singapura menuju Jakarta, jenazah Ali Alatas didampingi oleh Duta Besar RI untuk Singapura, Wardana.

Menurut informasi, Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi direncanakan akan melayat ke rumah duka.

Ali Alatas, yang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri selama empat periode (1988-1999) wafat pada hari Kamis di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, pukul 07.30 waktu setempat.

Menurut keterangan Deplu-RI, Alatas jatuh sakit sejak tanggal 20 Nopember 2008 dan dirawat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta namun pada tanggal 24 Nopember dipindahkan ke RS Mount Elizabeth di Singapura.

Ali Alatas wafat meninggalkan isteri, Yunisa Alatas, tiga puteri dan delapan cucu.(Jurnal Nasional)

B. EKONOMI :

1. Diversifikasi Pasar Ekspor, Mau Dibawa ke Mana?

Salah satu upaya pemerintah mengatasi krisis ekonomi adalah dengan menggenjot pangsa pasar ekspor. Sayangnya, terobosan diversifikasi pasar yang diklaim pemerintah sebagai peluang juga baru sebatas retorika.

Ya, diversifikasi pasar ekspor memang sontak kuat diperbincangkan di tengah kondisi kemerosotan perekonomian dunia tahun ini. Semua pihak seolah tersadar, pasar ekspor Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) tidak bisa lagi menjadi tumpuan utama.

Krisis finansial di AS begitu hebat menjalar hingga ke sektor ekonomi makro di banyak negara dunia. Sejumlah negara mulai limbung. Krisis ini diakui menohok keras ekonomi Indonesia. Lihat saja, ekspor yang menopang kegiatan ekonomi mulai luruh.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, ekspor nonmigas Oktober 2008 mencapai US\$ 9,00 miliar, turun 8,10 persen dibanding September 2008, sedangkan dibanding ekspor Oktober 2007, naik 8,22 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor nonmigas Indonesia Januari-Oktober 2008 mencapai US\$ 92,26 miliar atau meningkat 21,63 persen.

Penurunan paling tinggi terjadi pada ekspor ke AS sebesar US\$ 304,7 juta; China sebesar US\$ 184,4 juta; dan ke Korea Selatan sebesar US\$ 163,7 juta. Ekspor ke Jepang naik sebesar US\$ 145,8 juta, diikuti Taiwan sebesar US\$ 52,6 juta.

Sementara itu, ekspor ke Uni Eropa (27 negara) pada Oktober 2008 mencapai US\$ 1.336,9 juta. Tapi kalau melihat secara keseluruhan, total ekspor kedua belas negara tujuan utama turun 9,45 persen. Prospek ekspor tahun depan masih sulit diharapkan. Perdagangan dunia makin menyusut yang dimotori oleh menurunnya konsumsi di AS.

Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu dalam berbagai kesempatan sangat aktif menawarkan skema diversifikasi pasar ekspor ke Timur Tengah, Amerika Latin, Rusia, Afrika, India, dan China. Menurutnya, diversifikasi pasar ekspor harus dilakukan dalam situasi krisis ini.

Ide diversifikasi pasar sebenarnya sudah lama diwacanakan. Disebut-sebut, sejak dua atau tiga tahun terakhir, diversifikasi nyata belum terjadi. Kebijakan ini jalan ditempat. Tidak ada terobosan yang dilakukan sehingga ketika pasar andalan ekspor terganggu, otomatis Indonesia menjadi terganggu. Mendag pun mengakui pihaknya masih mencari format yang tepat mengerjakan diversifikasi pasar.

Tiap sektor sedang diidentifikasi negara mana yang menjadi tujuan ekspor sehingga benar-benar bisa menggandeng pelaku usaha di negara baru. Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko sinis menanggapi rencana Menteri Perdagangan tersebut. "Tidak ada gunanya lagi, semua negara sedang resesi. Terlambat kalau sekarang mau diversifikasi pasar," tegas Eddy.

Eddy menekankan sejak awal pemerintah hanya bisa mendengungkan wacana tanpa ada realisasi. Padahal, pasar Timur Tengah, Afrika, dan Rusia yang dibidik Indonesia sudah dikuasai produk-produk China. Potensi di kawasan yang disebut sebagai emerging market terlewat begitu saja. "Saya baru dari Dubai, 90 persen produk yang beredar di sana berasal dari China. Pasar mereka sudah kuat, tinggal mengembangkan saja," tukasnya.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat juga mengatakan Indonesia tertinggal jauh dalam melaksanakan diversifikasi pasar ekspor. Dia menilai sudah seharusnya Indonesia meniru negara lain, seperti China, soal diversifikasi pasar. Untuk pengembangan pasar tekstil, peluang di Timur Tengah dan Eropa Timur sebenarnya sangat terbuka lebar. Kawasan ini sangat kuat, tanda-tanda resesi tidak signifikan.

Potensi pasar garmen ada di Jepang. Dengan fasilitas Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA), bea masuk nol persen untuk garmen seharusnya bisa menjadi peluang mendongkrak daya saing dan akses ke Jepang. Tetapi, faktanya banyak ketidaktahuan di kalangan eksportir soal peluang ini. Sosialisasi pemerintah soal ini dituding sangat minim.

"Pangsa pasar produk garmen China di Jepang hampir 80 persen. Tapi meski Indonesia sudah punya fasilitas tidak dimanfaatkan dengan baik. Produsen tidak tahu struktur pasar Jepang, pemain utamanya siapa. Tidak ada riset mendalam sehingga target ekspor garmen ke Jepang tidak signifikan," tegas Ade.

Ade mengaku kecewa terhadap pemerintah yang tidak punya terobosan menyeluruh soal diversifikasi pasar. Strategi memahami pasar tujuan ekspor tidak dilakukan. Dia merujuk China yang jitu dan cerdas mendalami suatu pasar yang dituju. Itu sebabnya China menguasai pasar

Timur Tengah. “China programnya sangat komprehensif. Contohnya China memiliki property show di kota-kota utama Timur Tengah,” tegasnya.

Pertumbuhan ekspor Indonesia di Timur Tengah dan Afrika memang mengalami peningkatan. Selama lima tahun terakhir (2003-2007) nilai ekspor nonmigas Indonesia meningkat rata-rata sebesar 19,02 persen per tahun, dari US\$ 3 miliar tahun 2003 menjadi US\$ 6 miliar tahun 2007.

Uni Emirat Arab merupakan pasar utama tujuan ekspor nonmigas Indonesia ke kawasan Timur Tengah dan Afrika yang menyerap 21,93 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia. Persaingan memperebutkan pasar UEA sangat tinggi karena penerobosan pasar ke UEA dari Asia dan sesama ASEAN adalah China, Malaysia, Thailand, Taiwan, Jepang, Vietnam, dan Singapura.

Banyak kritik yang dilontarkan kalangan pebisnis terhadap pelaksanaan diversifikasi pasar, mulai dari penyelenggaraan pameran yang tidak dilakukan dengan cerdas hingga tidak adanya dukungan terobosan di bidang finansial. Lantas, jika seperti ini, akan diarahkan ke mana diversifikasi pasar ekspor kita? (Sinar Harapan)

2. Foreign investment up, Jakarta takes most

Endowed with rich natural resources and a large population, Indonesia is becoming more attractive for investors as indicated by an increase in the number of realized direct investment projects involving foreign businesspeople.

Chairman of the Investment Coordinating Board (BKPM) Muhammad Lutfi said Wednesday actual domestic and foreign investment had reached US\$14.2 billion in the January to November period, higher than the full-year target of \$9.92 billion.

Top 10 realized FDI by country of origin in 2007 (in million of dollars)		
Country	Investment	Projects
1. Singapore	3,748.0	124
2. United Kingdom	1,685.8	63
3. South Korea	627.7	164
4. Japan	618.2	113
5. Taiwan	469.7	33
6. Seychelles	281.0	3
7. Mauritius	223.9	7
8. Malaysia	217.3	56
9. Australia	195.3	26
10. Brazil	165.1	2
11. Others	2117.6	392
TOTAL	10,349.6	983

Realized FDI		
2008 (Jan-Nov)	12,500.0	
2007	10,349.6	
2006	5,977.0	
2005	8,916.9	
2004	4,572.1	
2003	5,445.3	
2002	3,082.6	

Source: BKPM

Of the total, \$12.5 billion was foreign direct investment (FDI), and the remaining \$1.7 billion was domestic-based.

“FDI jumped by 40 percent during the period ... But domestic investment plunged by 51 percent,” said Lutfi, who was a member of President Susilo Bambang Yudhoyono’s campaign team during the 2004 election.

"The drop in domestic investment is due to the fact that local companies prefer to form joint ventures with foreign companies in order to pay less tax," he said, adding that the condition was unlikely to continue as the government would soon implement a new tax law.

Under the new tax scheme, income tax will be slashed to 28 percent in 2009 and to 25 percent in 2010 from the current 30 percent.

The actual investment figure excludes those in the sector of oil and gas, mining, banking and financial institutions, including insurers.

Jakarta received the largest chunk of FDI, reaping \$9.62 billion from 404 projects, followed by West Java with \$2.39 billion from 255 projects, and Riau with \$460.9 million from eight projects. In domestic investment, West Java ranked the top with Rp 3.67 trillion (US\$334 million) from 52 projects, tailed by East Java with Rp 2.56 trillion from 37 projects, and Banten with Rp 1.95 trillion from 29 projects.

According to Lutfi, the transportation, storage, telecommunications, metal, machinery, electronics and automotive sectors were the largest contributors to the investment.

"The good news is that so far some 650,000 people have been employed in the realized investment projects (begun) between January and November." "This is a sign that our investment climate is getting better. We hope the trend will continue, especially through intense and serious efforts by local administrations to net more investors," Lutfi said.

Last year, FDI reached \$10.34 billion; with top sectors including transport, storage, communications and chemicals and pharmaceutical.

Domestic investment topped Rp 34.8 trillion (\$3.16 billion), primarily due to projects involving the paper and printing industry, the food industry and the metal, machinery and electronics industry. (The Jakarta Post)

3. 'Produk RI hanya butuh sentuhan brand awareness'

Produk Indonesia mempunyai kualitas yang baik dan hanya memerlukan sentuhan brand awareness. Ahmad Djauhar, Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia, berpendapat soal kualitas bagi produk Indonesia sebenarnya sudah mampu bersaing.

"Jadi, produk Indonesia tinggal perlu sentuhan brand awareness," ungapnya saat acara puncak Anugerah Produk Asli Indonesia di Balai Kartini Jakarta, hari ini.

Kendati demikian, Wakil Pemimpin Perusahaan PT Jurnalindo Aksara Grafika, penerbit Bisnis Indonesia, Haryadi B. Sukamdani, dan Sekjen Depperin Agus Tjahajana mengakui tantangan terberat dalam mengangkat harkat dan martabat produk asli Indonesia adalah lebih bangga menggunakan barang impor.

Padahal, kata Agus, penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat Indonesia akan sangat membantu kita bertahan dari krisis.

"Dengan pasar kita yang sangat luas, semestinya kita bisa lebih kuat bertahan saat krisis dibandingkan dengan negara-negara tetangga," ucap Sekjen Depperin. (Bisnis Indonesia)

4. Tahun 2009 Beban Cukai Naik 7 Persen

Pemerintah mengubah kebijakan tarif cukai rokok yang menyebabkan beban pembayaran perusahaan rokok meningkat rata-rata 7 persen. Ini akan menaikkan harga jual rokok dan menahan pertumbuhan konsumsi rokok dari 7 persen pada 2008 menjadi 5 persen pada 2009.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan hal itu di Jakarta, Rabu (10/12). Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau tanggal 9 Desember 2008 dan berlaku mulai 1 Februari 2009.

Menurut Anggito, kenaikan harga jual rokok diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Kenaikan harga inilah yang menjadi sarana pemerintah untuk menurunkan konsumsi rokok.

Meski demikian, penerimaan pemerintah dari cukai rokok akan meningkat menjadi Rp 48,2 triliun. Itu Rp 2,7 triliun lebih tinggi dari perkiraan realisasi penerimaan cukai pada tahun 2008.

"Tahun depan, konsumsi rokok dipatok 240 miliar batang, naik 5 persen dibandingkan dengan tahun 2008," ujar Anggito.

Dari target penerimaan cukai itu, pemerintah mengalokasikan Rp 960 miliar untuk dana bagi hasil (DBH) cukai yang diberikan kepada daerah penghasil rokok. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat balai latihan kerja dan memperkuat operasi cukai atau rokok ilegal. Pada tahun 2008, pemerintah menutup sekitar 2.000 pabrik rokok di Jawa karena tidak membayar cukai.

Akibat perubahan kebijakan cukai ini, sebagai contoh, tarif cukai rokok golongan sigaret kretek mesin (SKM) diubah menjadi Rp 290 per batang. Sebelumnya, tarif cukai SKM adalah gabungan antara tarif advalorem (persentase dari harga jual eceran/HJE) sebesar 35 persen dan tarif spesifik Rp 35 per batang.

"Perhitungan cukai jadi lebih sederhana. HJE hanya digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai dan tidak untuk menetapkan cukai," ujar Anggito.

Padat karya dikorbankan

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Soemiran menegaskan, kebijakan baru pemerintah itu tidak berpihak pada industri padat karya. Itu terlihat dari perubahan tarif cukai di setiap golongan.

Tarif cukai untuk sigaret kretek tangan (SKT) naik paling tinggi, yakni 11,32 persen untuk golongan I, 9,09 persen untuk golongan II, dan naik 33,33-150 persen untuk golongan III. Bandingkan dengan tarif pada kelompok SKM yang naik 3,23-4,88 persen pada golongan I; naik 0,52-2,49 persen untuk golongan II, dan naik 14-44,98 persen untuk golongan III.

"Artinya, tarif untuk industri padat karya (SKT) justru naik paling tinggi. Ini belum memperhitungkan perlemahan rupiah dan kenaikan UMK (upah minimum) kabupaten/kota." papar Ismanu.(ANTARA)

C. SOSBUD

1. Menkes Minta WHO Ubah Aturan Pembagian Virus AI

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari minta Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO agar membuat perubahan yang mencolok atau signifikan mengenai pembagian dan pemantauan virus avian influenza (H5NI) dalam sistem WHO.

Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu menjelaskan, seruan Indonesia itu disampaikan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari pada sidang pembukaan Pertemuan Lanjutan Antar Negara bagi persiapan Pandemi Influenza atau intergovernmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness (IGM-PIP) yang berlangsung di Jenewa 7-13 Desember 2008.

"Menteri Kesehatan menyarankan untuk mengganti jaringan Surveilans Influenza Global yang berlaku saat ini dengan Jaringan Influenza WHO yang lebih setara dan transparan yang menggabungkan Perjanjian Transfer Material Standar dengan sistem berbagi manfaat virus dan pengendalian lebih ketat terhadap pemantauan serta penggunaan virus H5N1," demikian siaran pers.

Dalam kesempatan ini, Siti Fadilah mengemukakan kekhawatirannya mengenai tidak adanya kemajuan dalam sistem berbagai manfaat.

"Sistem berbagi manfaat dari virus sharing - adalah suatu komponen penting dalam sistem tersebut," katanya.

Ia mengatakan "Saya masih belum melihat bagaimana negara maju dapat menyampaikan manfaat ini ke dalam bentuk yang nyata".

Wakil Indonesia ini mengharapkan krisis ekonomi global ini pada akhirnya dapat membuka jalan bagi transparansi dan kerja sama antarnegara yang lebih baik.

"Kami Indonesia memiliki pengetahuan terbatas mengenai dampak jangka pendek, menengah dan panjang. Hanya saja, saya berharap hal itu tidak akan menghentikan negara maju bersama negara berkembang untuk membangun sistem berdasarkan kepercayaan, melalui sistem berbagai manfaat yang timbul dari penggunaan virus dan bagian-bagiannya," kata Menkes.

Indonesia saat ini menolak pengiriman sampel H5N1 yang berasal dari penderita flu burung di dalam negeri, sementara mengimbau agar sistem virus sharing WHO menjadi sistem yang lebih adil, transparan serta setara.

Pemerintah Indonesia menunjuk pada sejumlah kasus yang tercatat dimana jenis virus Indonesia dicantumkan dalam pengajuan aplikasi paten perusahaan di AS, sebagai bukti bahwa sistem sekarang ini tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya dan merugikan negara berkembang dimana virus itu berasal.(ANTARA)

D. HANKAM

1. Indonesia-Malaysia Sepakat Mantapkan Kerjasama Perbatasan

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

PEMERINTAH Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memantapkan kerjasama dalam penanganan perbatasan kedua negara, baik dari segi sosio-ekonomi, keamanan maupun kesejahteraan.

"Kerjasama bilateral RI dan Malaysia yang terkait dengan masalah perbatasan yang diwadhahi General Border Commiittee (GBC), telah berjalan cukup baik," kata Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono dalam pembukaan Sidang Ke-37 GBC Malaysia-Indonesia di Jakarta, Kamis (11/12).

Ia mengatakan, kedua negara memiliki kepentingan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di perbatasan kedua negara, memberikan perlindungan, rasa aman, serta melestarikan lingkungan hidup di daerah perbatasan.

Juwono mengatakan kedua pihak perlu untuk terus melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan di perbatasan yang telah berjalan dalam rangka meningkatkan kinerja serta merumuskan bentuk kerjasama baru dalam mengatasi berbagai persoalan perbatasan.

Pada kesempatan yang sama Perdana Menteri Malaysia yang merangkap Menteri Pertahanan Malaysia Dato` seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi mengatakan, sebagai negara yang bertetangga dan memiliki perbatasan darat serta laut yang luas, maka kedua pihak perlu meningkatkan kerjasama perbatasan.

"Kita tidak boleh puas dengan segala yang sudah dicapai, karena berbagai kejahatan akan terus terjadi di wilayah perbatasan," katanya. Berbagai kegiatan ilegal di perbatasan, lanjut Badawi, sangat merugikan kedua pihak terutama di sektor sosio ekonomi.

Malaysia, tambah Badawi, akan konsisten dan komit dengan kerjasama yang telah disepakati dalam penanganan dan pengelolaan wilayah perbatasan secara lebih baik.(Jurnal Nasional)

E. HUKUM

1. Pemerintah Gagal Jamin Hak Konstitusi Warga Negara

Pemerintah dinilai gagal menjamin hak konstitusional individu dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Hal itu ditandai banyaknya produk hukum yang membatasi ruang gerak kebebasan individu dalam menjalankan praktik beragama. Demikian laporan tahun The Wahid Institute yang disampaikan Direktur Eksekutif The Wahid Institute Ahmad Suaedy, di Jakarta, Rabu (10/12).

Selain membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah juga ikut menjadi pelanggar hak individu dan warga negara melalui regulasi hukum yang kental nuansa ajaran agama tertentu serta bisa meminggirkan hak kelompok agama lain.

Sepanjang tahun 2008, katanya, pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara tidak semata dilakukan pemerintah pusat, namun meluas hingga ke aparaturnya penegak hukum, wali kota, bupati, DPR, bahkan MUI dan kelompok masyarakat mayoritas.

Dia mengatakan, pemerintah daerah (bupati/wali kota) tercatat sebagai pelaku yang paling sering melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan jumlah persentase 27 persen dan 11 persen. Hal ini mencerminkan buruknya kapasitas para pejabat publik memahami pentingnya menjaga nilai pluralisme dalam kehidupan sosial.

"Para pejabat masih belum bisa membedakan antara kapasitas dirinya sebagai pemeluk agama tertentu dengan keberadaan sebagai pejabat pemerintah. Untuk itu, harus ada pelatihan untuk para pejabat di daerah agar bisa bersikap profesional," kata Ahmad Suaedy.

Suaedy menyatakan, negara bertanggung jawab terhadap torehan pelanggaran yang telah dilakukan atau dengan sengaja dibiarkan terbengkalai tanpa adanya proses hukum. Selain itu, dia juga meminta masyarakat untuk bisa membedakan antara isu agama dan isu politik yang dikemas dalam bungkus agama. Selama ini, menurutnya, agama sering dipolitisasi, baik oleh pemerintah, DPR, maupun kelompok tertentu untuk memuluskan kepentingan tertentu.

Pragmatis

Ketua Komnas HAM Ildal Kasim mengatakan, pengesahan UU Anti Pornografi sebagai bentuk pragmatisme politik pemerintah dan DPR yang ingin menuai simpati masyarakat menjelang Pemilu 2009. Ildal menambahkan, selama ini pemerintah telah jauh terlibat dalam persoalan privat yang seharusnya menjadi hak penuh setiap individu. Pemerintah seharusnya berperan sebagai pengawas yang menjamin terpenuhinya hak konstitusional dalam beragama dan berkeyakinan.

Peringatan kepada pemerintah dan masyarakat juga disampaikan Kamala Chandrakirana yang menjabat sebagai Ketua Komnas Perempuan. Menurutnya, keadaan saat ini sebagai suatu keadaan perebutan negara untuk menentukan arah dan masa depan bentuk negara Indonesia. "Kita termasuk pihak yang memperebutkan negara, yang bertujuan untuk menjamin negara mematuhi konstitusi," tegasnya.

Produk hukum yang berpijak pada ajaran agama tertentu, kata Kamala, harus terus digugat keberadaannya. Itu menjadi kewajiban semua pihak yang peduli terhadap hak-hak kaum minoritas yang kerap terabaikan. Jangan sampai Indonesia berubah menjadi negara agama yang berdasar pada ajaran atau bahkan tafsir keagamaan tertentu. (Sinar Harapan)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Indonesia Negara II Miliki Keanekaragaman Hayati

Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang memiliki keaneka-ragaman hayati tertinggi setelah Brasil yang berada di kawasan `Wallacea` Sulawesi yang ditemukan Alfred Russel Wallace dari Amerika, perlu dilestarikan dan dikaji pemanfaatannya bagi kepentingan orang banyak.

"Wallace adalah orang pertama yang menyadari fenomena kekhasan geologi Sulawesi, padahal dia bukanlah seorang ahli geologi melainkan seorang naturalis, patut dihargai penemuannya bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya di wilayah Timur Indonesia," kata Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu`mang di Makassar, Rabu malam.

Pada Pembukaan International Conference On Alfred Russel Wallace And The Wallace di Baruga Sangiaseri Gubernuran, Makassar, Wagub mengatakan, keunikan sejarah pembentukan Sulawesi beserta pulau-pulau satelitnya mulai disadari bahwa hasil pengamatannya terhadap kekhasan flora-fauna Sulawesi yang berbeda dengan pulau besar lainnya.

"Ini sebuah karya ilmiah yang fenomenal yang menjadikan Wallace sebagai ilmuwan peletak dasar ilmu biografi yang mempelajari penyebaran flora dan fauna di kawasan itu," katanya.

Karena itu, lanjutnya, warisan terbesar penemu asal Amerika ini justeru merupakan sejarah yang terlupakan namun kemudian diangkat kepermukaan mantan Presiden BJ. Habibie, salah satu putra Sulawesi pada tahun 1992 dengan mengabadikan nama Wallace menjadi sebuah lembaga bernama `Yayasan Pengembangan Wallacea`.

Kegiatan penemuan di bidang medis dari keaneka-ragaman hayati kelautan merupakan bukti nyata pentingnya Wallace digali dan diteliti para peneliti di bidang tersebut, termasuk dari LIPI guna melanjutkan dan mengembangkan penelitian biologi seperti yang pernah dilakukan Alfred Russel dar kepulauan Raja Ampat hingga Maluku.

"Kita berharap hasil penelitian itu dapat bermanfaat bagi kemaslahatan dan kemamuran rakyat Indonesia," ujarnya seraya mengajak peneliti dari berbagai Perguruan Tinggi khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk bergabung dalam ekspedisi penelitian dari LIPI guna menggali potensi alam di wilayah Wallacea.

Menurut Agus Arifin Nu`mang, mantan Ketua DPRD Sulsel, kawasan Wallacea masih menjanjikan terciptanya karya-karya baru di bidang ini yang lebih mensejarah bagi masa depan bangsa Indonesia.

Ia mengajak peserta konferensi tersebut khususnya dari negara sahabat yang ikut dalam pertemuan ini untuk menyempatkan waktu mengunjungi Taman Nasional Bantimurung kabupaten Maros, 35 kilometer utara Makassar, yang memiliki keaneka-ragaman hayati yang merupakan salah satu tempat AR. Wallace mengadakan penelitian sebelum melanjutkan perjalanannya ke Sulawesi Utara dan Kepulauan Maluku.

Peserta International Conference on Alfred Russel Wallace and The Wallacea yang diikuti sekitar 200 orang peneliti dari berbagai negara, dirangkaikan memperingati 150 tahun `Letter From Ternate` yang ditulis AR Wallace. (ANTARA)

III. ARTIKEL :

1. Krisis tak pengaruhi WNI ke Singapura (oleh : Zufriзал)

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

Sektor pariwisata Singapura boleh saja terpuak akibat dampak dari krisis finansial global yang melanda dunia sejak beberapa bulan belakangan ini.


Namun, tidak demikian halnya dengan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi turis paling banyak menyambangi Negeri Pulau itu dibandingkan dengan wisatawan mancanegara lainnya.

Jumlah WNI masih menempati urutan pertama sebagai pengunjung setia ke Singapura. Rata-rata 20% turis yang datang ke Singapura berasal dari Indonesia.

Singapore Tourism Board (STB) baru-baru ini melansir jumlah pelancong yang datang ke negara itu selama Oktober 2008 tercatat 843.000 orang. Angka tersebut ternyata mengalami penurunan sebesar 8,1% dibandingkan dengan pencapaian pada bulan yang sama 2007 sebanyak 911.000 turis.

Memang kontribusi penurunan utama berasal dari turis asal Indonesia yang anjlok sebesar 27% dari 215.000 orang (Oktober 2007) menjadi hanya 157.000 orang.

Namun, kalau melihat angka-angka sejak terjadinya krisis global sekitar Juni lalu, tren kunjungan WNI ke Singapura dalam 3 bulan terakhir ini cenderung meningkat. Padahal, di sisi lain arus turis yang datang ke Singapura menunjukkan grafik fluktuatif. (lihat tabel)

Perkembangan kunjungan turis ke Singapura s.d Oktober 2008 (ribu orang)		
	Total (dari berbagai negara)	Asal Indonesia
Januari-Juni	5.100	855
Juli	916	167
Agustus	842	133
September	739	143
Oktober	843	157

Sumber: Singapore Tourism Board

Jumlah WNI ke Singapura akhir tahun ini diprediksi bakal melonjak terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru, sehingga tren peningkatan arus kunjungan orang Indonesia terus berlanjut.

Pemerintah Singapura mengakui bahwa penurunan turis sejak Juli sampai dengan September 2008 sebagai dampak dari krisis global yang diperkirakan berlangsung hingga tahun depan.

STB memprediksikan target kunjungan ke Singapura sebanyak 10,8 juta orang tahun ini dan perolehan dari pengeluaran turis sebesar Sin\$15,5 miliar selama tahun ini sulit tercapai. Biasanya, sekitar 20% dari penerimaan tersebut bersumber dari orang Indonesia.

Mudah dijangkau

Kedekatan jarak menjadi salah satu alasan mengapa banyak WNI berkunjung ke Singapura dengan tujuan mulai dari berlibur sambil berbelanja, urusan bisnis, berobat, hingga menengok kerabat yang tinggal untuk bekerja dan bersekolah di negara itu.

Moda transportasi yang digunakan juga tidak hanya pesawat terbang. Kapal laut seperti feri cepat yang melayani rute dari pulau-pulau di sekitar Provinsi Kepulauan Riau, khususnya dari Pulau Batam menjadi pilihan utama pula.

Terbukti dari statistik STB di mana turis asal Indonesia yang masuk menggunakan angkutan laut hampir, bahkan lebih banyak, dibandingkan dengan angkutan udara.

Sebagai contoh, selama 2006, dari 1,92 juta WNI yang berkunjung ke Singapura, 943.048 di antaranya menggunakan moda transportasi laut, hanya 736.885 yang lewat jalur udara, dan selebihnya melalui jalur darat (dari Malaysia).

Tingginya angka kunjungan turis asal Indonesia ke Singapura melalui jalur laut memiliki beragam alasan. Namun, yang utama karena lebih murah, baik dari segi biaya untuk transportasi dan fiskal.

Untuk masyarakat yang memiliki paspor yang diterbitkan Imigrasi di Kepulauan Riau, mereka tidak perlu merogoh biaya fiskal alias nihil. (Bisnis Indonesia)

2. The Bali Democracy Forum and our own problems (by Aleksius Jemadu)

Today political leaders representing 21 countries attended the launching of the Bali Democracy Forum (BDF). This was initiated by the Indonesian government to promote regional cooperation in the field of democracy and political development in Asia.

There are at least three coincidences which explain why the Indonesian government took this initiative to establish BDF.

First, it coincides with the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Despite some setbacks in the area of human rights promotion the Indonesia government is confident enough to declare that it has at least respected people's political and civil rights.

Second, Indonesia has just ratified the ASEAN Charter whose principles include the promotion of democracy and human rights. Indonesia seems to deliberately inviting the participants from outside Southeast Asia in order to avoid a direct confrontation with the principle of noninterference.

The critics argue that the democratic members of ASEAN -- including Indonesia -- have failed to prevent the centrality of the noninterference principle in the ASEAN Charter. Thus, BDF can be seen as Indonesia's strategic agenda to spread democratic values at the regional level.

On top of that, the Indonesian government is aware of the fact that as far as the promotion of democracy in Asia is concerned, Indonesia is in the best position to do the job. Japan has its political sensitivities with China and India has a conflictual relationship with Pakistan.

Other democratic countries in Southeast Asia such as Thailand and the Philippines are still struggling with the setbacks of their respective democracies and are not large enough to have the necessary political leverage at the regional level.

Third, the choice of Bali as the location for the launching of BDF is not without political significance. Since his election in 2004, President Susilo Bambang Yudhoyono has developed an obsession to portray Indonesia as a moderate voice of Islam in many arenas of world politics. He seems to have appointed himself to be the main author of this idea and on the basis of this political credential he wants to mobilize international support for his second term in the 2009 presidential election.

Regardless of Indonesia's sincerity in this initiative, there are some critical comments about the future effectiveness of BDF.

First, Indonesia does have some democratic credentials which might be attractive to other countries. For instance, Indonesia may share with others its experience in the peaceful resolution of the separatist conflict in Aceh.

However, the setbacks of democracy in Asia -- including Indonesia -- have much to do with the weak commitment of domestic political elites. Thus, the political energy to develop democracy should come from within the country itself. For the most part, moral persuasion or exhortation from outside usually falls on deaf ears.

Second, if BDF is seen as a tricky follow up to Indonesia's ratification of the ASEAN Charter, people might ask why not focus on the strengthening of the security regime within the framework of the ASEAN Security Community.

One of ASEAN's embarrassing ironies is related to the fact that its success in requesting the major powers to sign the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) is not followed by the willingness of some of its members to renounce the use of military power in resolving their border conflicts. The latest example was the exchange of fire between Thai and Cambodian soldiers in settling their territorial dispute.

Third, the realistic interpretation of international politics is correct that in the final analysis the effectiveness of diplomacy is mainly determined by a solid basis of material power. Immaterial power such as ideas, experience or best democratic expressions produces an ineffective influence upon the actual behavior of nations.

Fourth, it is very much expected that the planned, regular meetings of BDF will not be confined to formal interactions among government officials. The constraint of diplomatic procedures will limit the capacity of government officials in reaching out to the potential democratic forces of a targeted country. BDF needs to encourage the participation of the transnational networks of civil society organizations as the social foundation of democracy.

Last but not least, whenever there is an initiative to conduct international programs which require financial commitment there is always a problem of who is going to pay the bill. In the midst of a global financial crisis it is not easy to mobilize resources unless it is really urgent.

We just hope that the participants of BDF -- especially the wealthier ones -- are willing to allocate the necessary funds so that the forum might be able to accomplish all its intended goals. (The Jakarta Post)

IV. LAIN-LAIN : **T i d a k**
Ada
V. EDITORIAL :

1. **60 Tahun Deklarasi HAM**

Sidang Umum PBB 10 Desember 1948 menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tidak ada negara yang menolak, sementara tujuh negara abstain.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan tonggak penting umat manusia dalam menjunjung tinggi dan menghormati hak asasinya, yang dalam perjalanan sejarah sering terinjak-injak, terutama oleh mereka yang berkuasa. Deklarasi menjanjikan dunia yang lebih baik.

Kini, 60 tahun kemudian, Deklarasi Universal HAM diperingati di berbagai belahan dunia. Namun, gambaran ideal manusia sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi belum semuanya bisa dipenuhi, termasuk di Indonesia. Dari sekitar 6,4 miliar penduduk dunia, masih terdapat sekitar 2,5 miliar yang dikategorikan miskin.

Berakhirnya kekuasaan Soeharto 10 tahun lalu menjadi tonggak penting terbukanya keran kebebasan sipil dan politik. Kebebasan menyatakan pendapat, berorganisasi, dan membentuk partai politik terbuka selebar-lebarnya. Rakyat memperoleh kembali hak sipil dan politik yang terampas pada saat Orde Baru berkuasa.

Namun, sepuluh tahun kemudian, justru kebebasan sipil dan politik yang telah direngkuh mulai dipertanyakan manfaatnya bagi kesejahteraan manusia. Itu terjadi ketika kebebasan hanya dimaknai sebagai kebebasan itu sendiri. Bukan sebuah kebebasan yang ditujukan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kebebasan sipil yang selama ini jadi ikon era reformasi dipertanyakan eksistensinya seiring dengan munculnya kelompok yang kadang menafikan toleransi dan kebinekaan. Keberagaman kita yang seharusnya jadi modal sosial justru dalam keadaan bahaya. Pada sisi lain terdengar jeritan korban pelanggaran HAM yang tak kunjung mendapat keadilan. Negara memang aktif dalam meratifikasi norma HAM internasional, tetapi mengabaikan institusionalisasi norma tersebut. Pada sisi lain, negara justru memproduksi kebijakan yang meluruhkan solidaritas dalam masyarakat yang sebenarnya dibutuhkan untuk menghadapi krisis global.

Berbicara soal HAM tidak hanya sebatas pada kebebasan berbicara, berorganisasi, dan bebas dari penyiksaan. HAM bukan hanya soal keamanan nyawa manusia, tetapi juga kelangsungan hidup dan martabat manusia. Manusia tak mungkin hanya sekadar hidup. Manusia harus bisa hidup secara layak, termasuk mempunyai akses pada pendidikan dan kesehatan.

Pada peringatan 60 tahun Deklarasi Universal HAM, laporan Pangeran Sadruddin Aga Khan yang pernah menjabat Ketua Komisi Independen tentang Masalah-masalah Kemanusiaan Internasional menjadi relevan. Laporan Komisi sebagaimana dikutip dalam buku Hak Asasi Manusia (1994) yang disunting Peter Davies menyebutkan: "Humanisme adalah orientasi dasar ke arah kepentingan dan kesejahteraan seluruh bangsa manusia. Karena itu, apa saja yang menyimpang dari kesejahteraan manusia harus dipertanyakan terlepas dari pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kekuasaan politik, atau stabilitas suatu tatanan".(Kompas)

2. **Humans for sale**

There are many reasons to relish a new commitment between Australia and Indonesia in their fight against human trafficking, a long-standing issue that may spoil ties between the two neighbors.

After his talks with visiting Australian Prime Minister Kevin Rudd in Bali on Wednesday, President Susilo Bambang Yudhoyono said the two countries would step up measures to combat the transboundary crime through enforcement of the Lombok Treaty security cooperation signed on Sept. 13, 2006.

More efforts have been forged by the two governments to eradicate human trafficking since then, including a five-year program worth A\$21 million (US\$13.8 million) launched by Australia in August of last year in capacity building of Indonesia's criminal justice system to prevent regional human trade.

Reading between the lines of the president's statement, therefore, so far something must have gone wrong with the way Indonesia or Australia has translated the cooperation agendas into actions.

Since September of last year alone Australia has intercepted at least five Indonesian boats carrying dozens of people from war-torn or poor Asian nations who wished to seek a better life down under. Most recently the Australian authorities foiled an attempt to smuggle nine Afghans and three Iranians in the waters of Ashmore Islands on Nov. 19.

That the people smuggling or trafficking has remained unabated, if not rampant, despite the signing of the cooperation agreement has led to a suspicion that an organized people smuggling racket is behind the practice.

Then came the shocking report of the alleged involvement of certain individuals at the Indonesian Embassy in Kabul, which, if proven, would only confirm the U.S. State Department's suspicions that public officials have contributed to the complicity of Indonesia's human trafficking issue.

The Indonesian Foreign Ministry is investigating the report, which says that embassy officials sold visas for US\$1,500 each to Afghans wishing to fly to Indonesia en route to their land of hope, Australia. It remains unknown if the practice has been in place for years, but most definitely Indonesia has facilitated the illegal migration.

Early this month East Nusa Tenggara police arrested 13 Afghan and Pakistani illegal migrants bound for Australia and will deport them. Police chief Brig. Gen. Antonius Bambang Suedi said the foreign nationals had paid Rp 80 million (US\$7,100) for a trip to Australia aboard barely seaworthy boats. With maritime patrol commonly lax ahead of Christmas and New Year in the predominantly Christian province, more illegal migrants may come and go unnoticed.

The gravity of the country's human trafficking is obvious, despite the enactment of the 2007 law on anti-trafficking, which criminalizes debt bondage, labor exploitation and sexual exploitation, as well as transnational and internal trafficking. The crime carries between three and 15 years of imprisonment, with corporate entities and government officials involved in the practice facing maximum penalties.

UNICEF says Indonesia is not just a transit, but also a primary source and destination for human trafficking. It estimates that 100,000 women and children are trafficked annually for commercial sexual exploitation in Indonesia and abroad. Nearly one-third of the female prostitutes in Indonesia are below 18, and 40,000 to 70,000 children in the country are victims of sexual exploitation.

Indonesian women and children are trafficked overseas for sexual and labor exploitation in Malaysia, Singapore, Brunei, Taiwan, Japan, Hong Kong and the Middle East. Likewise, hundreds of women from China, Southeast Asia and the former Soviet Union states are smuggled into Indonesia every year to fulfill the demands of the local sex industry.

UNICEF child protection officer Anna-Karin Jatfors said sexual exploitation of children had been a "major and growing issue", with evidence of criminal syndicates operating throughout Indonesia and Asia.

Given the findings, it's understandable if the 2007 U.S. Department of State's Trafficking in Persons Report placed Indonesia in Tier 2 for not fully complying with the Trafficking Victims Protection Act's minimum standards for the elimination of trafficking but making significant efforts to do so.

No one is rapping our knuckles regarding our anti-human trafficking campaign, which has not lived up to the widely accepted standards. The challenges to the fight lie in the poor law enforcement and culture of corruption, but first of all it requires a change in everybody's awareness that human trade is a threat standing just on our doorstep. It is real and anyone -- including our daughters -- can fall prey to the crime. (The Jakarta Post)

Jakarta, 11 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu